



Wakil Bupati Ketapang Hadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Perumahan Perdesaan Di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Keterangan

Ketapang:KM – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., dengan tegas menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Perumahan Perdesaan, Selasa (29/04/2025) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Rakor yang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dalam penyediaan hunian layak di wilayah pedesaan.

Dalam forum tersebut, Wabup Jamhuri mempertanyakan secara langsung kepada pemerintah pusat terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan program perumahan perdesaan. Ia menyoroti apakah terdapat kuota khusus untuk tiap kabupaten serta bagaimana skema pembiayaannya — apakah melalui APBN, melibatkan pihak ketiga seperti developer, atau cukup ditangani oleh Pemerintah Daerah.

“Yang jadi persoalan di daerah bukan sekadar angka, tapi bagaimana rumah-rumah layak huni ini benar-benar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat miskin di pedesaan,” tegas Jamhuri.

Menurutnya, program rumah layak huni harus tepat sasaran dan tidak terjebak dalam prosedur teknis yang justru menghambat manfaat langsung kepada rakyat. Ia juga mendorong agar pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat bawah, khususnya mereka yang hingga kini belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak.

Kategori

1. Berita

Tanggal Dibuat
2025/04/29

Penulis
msaad

default watermark